

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pembinaan SMK sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin telah dibuatnya tiga macam laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah penyiapan perubahan basis akuntansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengamanatkan basis akrual mulai tahun 2008.

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan SMK masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja. Terdapat perbedaan antara ukuran kinerja yang tercantum dalam Renstra dan yang digunakan sebagai dasar laporan kinerja. Selain itu, penyusunan laporan masih mengacu pada Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 yang seharusnya sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja belum terkait satu sama lainnya. Hal ini disebabkan memang tidak terintegrasinya sistem keuangan dengan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah. Sistem keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah (SAKIP).

Balanced Scorecard bisa menjadi alternatif dalam peningkatan akuntabilitas Direktorat Pembinaan SMK. Model Balanced Scorecard dibuat berdasarkan empat perspektif, yaitu Perspektif Publik, Perspektif Keuangan, Perspektif Proses Internal, serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. Perspektif Publik atau masyarakat merupakan perspektif utama bagi Direktorat Pembinaan SMK yang didukung oleh Perspektif Keuangan, Proses Internal, dan Pembelajaran dan Pertumbuhan.

5.2. Kelemahan Penelitian

Penelitian ini hanya berdasarkan studi kepustakaan dan analisis dokumen yang ada di Direktorat Pembinaan SMK sehingga hasil penelitian tidak bisa dijadikan acuan pada organisasi lain. Model Balanced Scorecard yang dibuat belum dilakukan pengujian sehingga belum dapat digunakan secara langsung. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai model tersebut.

5.3. Saran

5.3.1. Untuk Direktorat Pembinaan SMK

Perlu adanya persiapan sistem keuangan berbasis akrual dalam menghadapi perubahan kebijakan akuntansi dari kas basis menjadi akrual basis dan pelatihan staf keuangan. Model Balanced Scorecard dapat dijadikan alternatif pengganti sistem akuntabilitas Direktorat Pembinaan SMK untuk periode yang akan datang.

5.3.2. Untuk Studi yang Akan Datang

Untuk studi yang akan datang perlu adanya penelitian lebih lanjut pada Model Balanced Scorecard yang telah dibuat. Selain itu, perlu adanya studi untuk mengaitkan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah.